

**URGENSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKARAKTER DALAM
MEMPENGARUHI PEMEKARAN WILAYAH
DARI ANCAMAN ETNOSENTRIS**

Bresca Merina

STISIP Kartika Bangsa Prodi Adinistrasi Negara Yogyakarta

(brescamerina1@gmail.com)

ABSTRAK

Pada dasarnya pemekaran daerah dilakukan bukan karena masalah ketidakadilan perlakuan terhadap etnik, melainkan karena kepentingan politik. Proyeksi kesejahteraan nomor satu diatas kertas, namun orientasi kekuasaan politik yang paling utama. Kepentingan untuk menduduki jabatan kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun pengisian jabatan-jabatan penting di daerah hasil pemekaran. Persinggungan etnik dengan kekuasaan terlihat jelas ketika begitu banyaknya lahir kelompok atau organisasi dengan sentimen keetnikan untuk mendukung pencalonan kepala daerah maupun anggota legislatif. Kelompok ini pun hadir karena kepentingan jangka pendek, merebut kekuasaan. Tidak bisa disangkal, semua berorientasi pada kepentingan terhadap kekuasaan. Kekuasaan sebagaimana dirumuskan Max Weber adalah kemampuan mengeliminasi berbagai kebiasaan dan keinginan orang lain dengan berbagai cara, misalnya paksaan, penyiksaan, manipulasi, bujukan dan sebagainya. Penulis menyimpulkan bahwa percepatan kebijakan pendidikan berkarakter di Wilayah Pemekaran untuk konteks Indonesia adalah keniscayaan. Kebijakan ini diharapkan akan mampu mengurai berbagai problem yang mengiringi pelaksanaan pemekaran wilayah yang syarat politik dan berpotensi konflik. Rekomendasi yang tepat dalam tulisan sederhana ini, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara konsisten memperhatikan masifnya perumusan kebijakan pendidikan karakter yang bisa menjadi unsur penting dalam mengurai berbagai macam intrik yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Kata Kunci : *Kebijakan Pendidikan, Pemekaran wilayah, Etnosentrisme*

A. PENDAHULUAN

Mutu pendidikan merupakan konsekuensi langsung dari suatu perubahan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan. Tuntutan terhadap mutu pendidikan tersebut menjadi syarat terpenting untuk dapat menjawab tantangan perubahan dan perkembangan itu. Hal itu diperlukan untuk mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan berkehidupan yang damai, terbuka dan berdemokrasi, serta mampu bersaing secara terbuka di era global. Untuk itu, pembenahan dan penyempurnaan kebijakan pendidikan menjadi hal pokok terutama terhadap aspek substantif yang mendukungnya yaitu kurikulum.

Kurikulum yang dirancang berdasarkan kompetensi ini dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum ini ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya bangsanya. Hal ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta mewujudkan karakter nasional.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Untuk itu, upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, pengetahuan,

keterampilan, seni, olahraga dan perilaku. Pengembangan aspek-aspek tersebut, bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup (*life skill*) yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri dan berhasil dimasa datang. Dengan demikian, peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian dan jati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran atau pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Sekolah adalah tempat dimana mutu pendidikan dirancang dan dipertahankan. Diharapkan sekolah dapat menanamkan pendidikan moral agar karakter bangsa dapat tercermin dari kualitas siswa yang dihasilkan dari sekolah tersebut. Terdapat dua macam nilai dalam kehidupan yaitu moral dan nonmoral. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab dan keadilan adalah hal-hal yang dituntut dalam kehidupan ini. Kita akan merasa tertuntut untuk menepati janji, berlaku adil dalam bergaul di masyarakat dan toleransi.

Program pendidikan moral yang berdasarkan pada dasar hukum moral dapat dilaksanakan dalam dua nilai moral yang utama, yaitu sikap hormat dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut mewakili dasar moralitas utama yang berlaku secara universal. Mereka memiliki tujuan, nilai yang nyata, dimana mereka mengandung nilai-nilai baik bagi semua orang baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Nilai-nilai rasa hormat dan tanggung jawab tersebut sangatlah diperlukan untuk pengembangan jiwa yang sehat, kepedulian akan hubungan interpersonal, sebuah masyarakat yang humanis dan demokratis dan dunia yang adil dan damai.

Hormat dan tanggung jawab merupakan landasan sekolah yang tidak hanya memperbolehkan, tetapi mengharuskan para guru untuk memberikan pendidikan tersebut untuk membangun manusia-manusia yang secara etis berilmu dan dapat memposisikan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab.

Bentuk-bentuk lain yang sebaiknya diajarkan disekolah adalah kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, tolong menolong, peduli sesama, kerja sama, keberanian, dan sikap demokratis. Nilai-nilai khusus tersebut merupakan bentuk dari rasa hormat dan bertanggung jawab.

Karakter menurut pengamatan seorang filsuf kontemporer bernama Michael Novak, merupakan “campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah”. Sebagaimana yang ditunjukkan Novak, tidak ada seorang pun yang memiliki semua kebaikan itu, dan setiap orang memiliki beberapa kelemahan. Orang-orang dengan karakter yang sering dipuji bisa jadi sangat berbeda antara satu dengan lainnya.

Indonesia jelas berbeda dengan banyak negara dalam hal keragaman etnik. Indonesia dikenal luas sebagai bangsa yang terdiri dari 300 suku bangsa. Angka berbeda disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan sensus suku bangsa yang dilakukan detail menunjukkan, Indonesia memiliki 1.128 suku bangsa. Jumlah suku bangsa yang demikian banyak itu menghadirkan ratusan bahasa. Penelitian yang dilakukan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional menemukan ada 746 jenis bahasa di Indonesia, atau 12 % dari total macam bahasa yang ada di dunia. Temuan ini menunjukkan adanya penambahan dibanding penelitian sebelumnya. Pada tahun 1970 hasil penelitian menemukan adanya 250 bahasa dari berbagai suku dan daerah di Indonesia.

Semua angka itu semakin menegaskan ketepatan makna semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semua keragaman itu sudah membaur erat dalam ikatan Indonesia. Kohesi kebersamaan itu adalah kemerdekaan Indonesia. Seluruhnya sepakat perlunya keragaman etnik ini disatukan dalam bungkus sebuah negara yakni, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Telah lama sudah keragaman etnik itu menjadi modal utama dalam mengikat

kebersamaan. Kini, pondasi keragaman itu mulai mendapat ancaman seiring dengan menguatnya sentimen kedaerahan. Etnisitas yang demikian kuat menyimpan potensi masalah sehingga menyebabkan munculnya etnosentrisme.

Indonesia merupakan daerah kepulauan dengan struktur dan budaya masyarakat yang beragama. Sebagai sebuah negara Kesatuan dengan keragaman budaya yang berbeda-beda, bentuk sistem pemerintahan yang terdesentralisasi lah menjadi salah satu alat pemersatu antar daerah. Namun banyaknya bermunculan konflik-konflik ditingkat Daerah menjadikan bentuk pemerintahan ini ternyata memberikan kesenjangan dan ketidakadilan sebagai dasar munculnya konflik.

Dalam pemaknaan umum berikutnya, etnik dipandang sebagai Kesatuan kelompok identitas saja dan seringkali berdasarkan cakupan geografinya atau dimana etnik itu berada. Maka Indonesia yang demikian luas dihuni demikian banyak kelompok etnik. Masing-masing punya kepentingan untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhannya. Pasca berlakunya otonomi daerah di Indonesia, sentimen kedaerahan berbalut etnik semakin menunjukkan bentuknya. Banyak daerah mengajukan otonominya dengan mempertimbangkan secara tegas batas-batas etnik maupun subetnik yang lebih kecil. Dengan demikian suatu hasil pemekaran masyarakatnya didominasi satu etnik tertentu. Beberapa daerah hasil pemekaran juga diberi nama merujuk pada nama etnik.

Di Sumatera Utara (Sumut), misalnya ada Kabupaten PakPak Bharat, daerah hasil pemekaran Dairi pada tahun 2003, yang umumnya didominasi suku PakPak. Sementara Kabupaten Nias yang sejak awal memang sudah bernama demikian karena merujuk pada nama pulau yang didiaminya, begitu juga dengan Pulau Nias didominasi oleh etnik Nias, kini sudah mekar pula dengan nama Nias Selatan. Nias Barat dan Nias Utara. Di Nanggroe Aceh Darusalam

(NAD) ada Kabupaten Gayo Lues, yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara, yang dominan dengan etnik Gayo. Di Provinsi Gorontalo terdapat etnik Gorontalo, sedangkan etnik Biak menjadi etnik mayoritas di Kabupaten Biak.

Pada dasarnya pemekaran daerah dilakukan bukan karena masalah ketidakadilan perlakuan terhadap etnik, melainkan karena kepentingan politik. Proyeksi kesejahteraan nomor satu diatas kertas, namun orientasi kekuasaan politik yang paling utama. Kepentingan untuk menduduki jabatan kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun pengisian jabatan-jabatan penting di daerah hasil pemekaran. Persinggungan etnik dengan kekuasaan terlihat jelas ketika begitu banyaknya lahir kelompok atau organisasi dengan sentimen keetnikan untuk mendukung pencalonan Kepala daerah maupun anggota legislatif. Kelompok ini pun hadir karena kepentingan jangka pendek, merebut kekuasaan. Tidak bisa disangkal, semua berorientasi pada kepentingan terhadap kekuasaan. Kekuasaan sebagaimana dirumuskan Max Weber adalah kemampuan mengeliminasi berbagai kebiasaan dan keinginan orang lain dengan berbagai cara, misalnya paksaan, penyiksaan, manipulasi, bujukan dan sebagainya.

Sekian puluh tahun kemudian, perbedaan suku menjadi persoalan baru. Semasa Otonomi Daerah saat ini, silang – pendapat maupun pertikaian disuatu daerah semakin sering didengar. Konflik Sambas di Kalimantan barat maupun Sampit di Kalimantan Tengah, menegaskan adanya persoalan – persoalan tersebut yang secara kasat mata terlihat dan menjadi masalah nasional. Di sebagian daerah, masyarakatnya mungkin tidak mempermasalahakan tetangganya Jawa, Sunda, Batak atau Ambon, namun di daerah lain hal ini menjadi penting. Perbedaan agama juga menjadi alasan untuk bertikai seperti di Poso maupun Ambon.

B. PEMBAHASAN

Urgensi Kebijakan Pendidikan Berkarakter

Kebijakan adalah terjemahan dari prioritas dan prinsip-prinsip politik pemerintah ke dalam program dan tindakan untuk memberikan perubahan yang diinginkan.

Dalam permulaan abad 21 yang akan kita hadapi saat ini, terdapat sedikitnya lima alasan menurut Lickona mengapa sekolah seharusnya memberikan arahan yang jelas dan menyeluruh tentang komitmen pendidikan moral dalam pengembangan karakter yakni sebagai berikut :

- a. Adanya kebutuhan yang begitu jelas dan mendesak. Jumlah pemuda yang melakukan tindak kekerasan baik terhadap guru maupun terhadap oranglain meningkat, kesadaran tentang kontribusi mereka terhadap kesejahteraan hidup sesama mulai menurun. Dalam refleksinya penyakit yang terjadi di masyarakat tersebut sedang membutuhkan pencerahan moral dan spiritual.
- b. Proses penghubungan nilai dan sosialisasi. Suatu masyarakat membutuhkan pendidikan nilai baik untuk sikap penyelamatan maupun perbaikan untuk tetap bersatu di dalamnya dan untuk maju bersama dalam menyesuaikan dan mendukung kehidupan dan perkembangan manusia sebagai bagian dari masyarakat tersebut.
- c. Peranan sekolah sebagai tempat pendidikan moral menjadi semakin penting ketika jutaan anak-anak hanya mendapatkan sedikit pendidikan moral dari orang tua mereka dan ketika makna nilai yang sangat berpengaruh yang di dapatkan melalui tempat ibadah lainnya perlahan tidak menghilang dari kehidupan mereka. Pada masa ini ketika sekolah tidak memberikan pendidikan moral, pengaruh kekerasan terhadap karakter anak-anak begitu cepat masuk dan membuat nilai-nilai yang berlaku menjadi vakum.
- d. Munculnya konflik di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dasar menyangkut etika. Tentunya, keragaman tersebut tidak

mampu membentuk suatu komunitas, kecuali berdasar pada kesamaan nilai yang mereka miliki, seperti keadilan, kejujuran, sosial, demokratis dan penghargaan tinggi terhadap nilai kebenaran.

- e. Pendidikan nilai disekolah kini memiliki sebuah pandangan dasar bermakna luas yang mendukung perkembangan pendidikan. Sekolah dituntut untuk memberikan pendidikan nilai dalam membentuk masyarakat yang berkualitas dan taat hukum.

Berikut ini diagram kualitas moral yang akan membentuk pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral menurut Lickona.

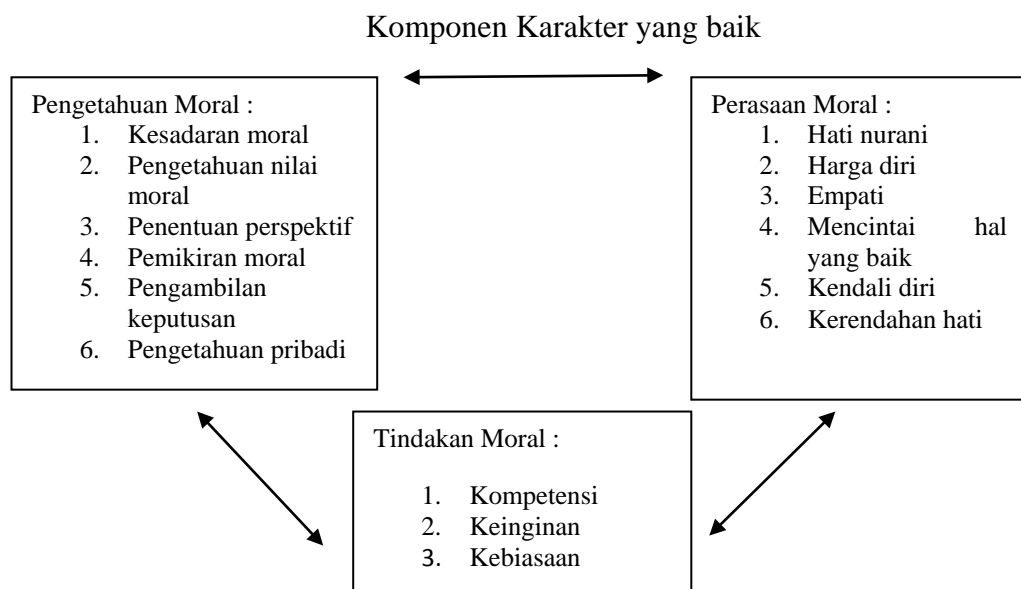


Diagram 1.1 Komponen karakter yang baik

Penulis yakin bahwa ciri-ciri ini merupakan kualitas spesifik yang harus kita coba untuk mewujudkan kebijakan pendidikan berkarakter. Anak panah yang menghubungkan masing-masing domain karakter dan kedua domain karakter lainnya dimaksudkan untuk menekankan sifat saling berhubungan masing-masing domain tersebut. Pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral tidak berfungsi sebagai bagian yang terpisah namun saling melakukan penetrasi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam cara apapun.

Pemekaran Wilayah versus Ancaman Etnosentris

Pemekaran wilayah telah menimbulkan permasalahan baru. Banyak aparat pemerintahan yang belum mampu secara kualitas dipaksakan menempati jabatan tertentu karena kekurangan sumber daya manusia sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menetapkan keputusan dan bertindak tegas hal ihwal yang timbul setelahnya. Apalagi jika masalah itu muncul sebagai akibat dari perilaku rekan sejawat. Oleh sebab itu, penyiapan kemampuan aparat dengan cara meningkatkan kualitas dan moral aparat dalam pengelolaan sebuah daerah baru melalui mekanisme pemekaran daerah perlu dilakukan agar pembangunan dan pengelolaan kawasan menjadi lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan otonomi daerah adalah memajukan daerah dengan menyingkat proses birokrasi di tingkat pusat dan daerah. Tak ada urusan etnik disana. Namun ketika masuk pada persoalan pemilihan kepala daerah, maka masalah etnik menjadi persoalan penting dan harus mendapat perhatian. Persaingan tidak sehat dalam pemilihan kepala daerah umumnya dimulai dari kampanye apakah putra daerah atau tidak. Jika sama sama putra daerah, maka akan ada model *black campaign* yang dilakukan. Uniknya, isu putra daerah ini hanya berlaku pada Kabupaten dan Kota yang notabene masih kuat ikatan primordialismenya. Dalam makna positif, primordialisme berarti kuatnya ikatan kedaerahan secara batiniah, melalui adat, agama dan kekerabatan. Sedangkan dalam makna yang negatif, primordialisme berarti sentimen kedaerahan yang cenderung dimanfaatkan untuk sesuatu yang bersifat kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemaknaan ganda terhadap kata primordial terjadi karena perkembangannya dalam masyarakat.

Ketika visi etnik demikian dikedepankan dalam memandang berbagai hal, secara keseluruhan inilah yang disebut etnosentrisme, yakni kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budayanya sendiri. Pandangan ini biasanya sering disebut dengan istilah rasisme. Menjadi

pengertian eksklusif bahwa setiap kelompok etnik atau ras mempunyai semangat bahwa kelompoknyalah yang superior dari kelompok lain. Maka kebenaran tentang sesuatu hal tidak suatu yang universal, melainkan didasarkan pada visi kebudayaan masing-masing etnis.

Etnosentrisme secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai suatu paham seseorang yang menilai kebudayaan-kebudayaan lain, menurut ukuran yang berlaku dalam kebudayaannya sendiri. Dalam *The Random House Dictionary*, sebagaimana dikutip Damanik, etnosentrisme justru diterjemahkan lebih negatif lagi, yakni kepercayaan pada superioritas inheren kelompok atau budayanya sendiri. Etnosentrisme mungkin disertai rasa jijik pada orang-orang lain yang tidak sekelompok, etnosentrisme cenderung memandang rendah pada orang-orang yang dianggap asing, etnosentrisme memandang dan mengukur budaya-budaya asing dengan budayanya sendiri.

Upaya-upaya mengedepankan keetnisan dalam berbagai hal memanglah bisa dipandang sebagai sebuah kekuatan yang dapat menciptakan persoalan. Di masa Demokrasi Terpimpin, yang disebut Orde Lama oleh rezim Soeharto untuk memberi makna yang lebih positif bagi rezimnya dengan sebutan Orde Baru, masalah etnik secara tidak langsung sudah menimbulkan masalah. PRRI/Permesta dipicu ketidakadilan pemerintah pusat terhadap pemerintah dan rakyat daerah yang dapat diterjemahkan sebagai Jawa dan Non-jawa. Pemberontakan di Aceh juga bibitnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno yang tidak memberi perhatian pada daerah dan masyarakat di Aceh. Menerima pembagian hasil begitu sedikit padahal daerah telah memberikan sangat banyak. Pemusatan pembangunan di kawasan jawa akhirnya membuat keirian yang terus menggunung dan mencuatkan etnosentrisme yakni perasaan dan ketegangan etnik yang begitu menonjol sehingga timbul kecenderungan untuk melepaskan diri dari pangkuan negara.

Dalam kondisi seperti ini, etnosentrisme menerabas semangat plurarisme dan multikulturalisme yang dibangun untuk mengikat Bhineka Tunggal Ika itu. Padahal jika dipergunakan dengan mengedepankan sisi positifnya, maka etnosentrisme dapat dijadikan modal yang besar dan kuat untuk menjaga keutuhan suatu bangsa dan stabilitas sosial budaya. apalagi globalisasi membuat semakin hilangnya sekat – sekat jarak dan wilayah, dan seseorang cenderung diidentifikasi melalui nasionalitinya bukan etniknya. Selain itu etnosentrisme dapat pula mempertinggi semangat patriotisme dan meningkatkan kesetiaan terhadap bangsa serta meneguhkan kecintaan terhadap tanah Air.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah, maka penulis menyimpulkan bahwa percepatan kebijakan pendidikan berkarakter di wilayah pemekaran untuk konteks Indonesia adalah keniscayaan. Kebijakan ini diharapkan akan mampu mengurai berbagai problem yang mengiringi pelaksanaan pemekaran wilayah yang syarat politik dan berpotensi konflik.

Sesuai dengan penjelasan pada kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang tepat dalam tulisan sederhana ini, yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara konsisten memperhatikan masifnya perumusan kebijakan pendidikan karakter yang bisa menjadi unsur penting dalam mengurai berbagai macam intrik yang berpotensi memecah belah persatuan Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Fristiana Irina. 2016. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Yogyakarta : Para Ilmu.

Herry Widiastono.2015.Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah.Jakarta:Bumi Aksara.

Khairul Ikhwan Damanik, dkk.2010.Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia

Leo Agustino. 2014. Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Bandung : Alfabeta

Michael Moran,dkk.2015. Handbook Kebijakan Publik, Bandung : Nusa Media

Thomas Lickona.2015.Mendidik untuk Membentuk Karakter:Bagaimana sekolah dapat memberikan pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggung jawab, Jakarta : Bumi Aksara